

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR



OLEH:

OKTAFINA PIKOLI

B111 10 385

BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI
KOTA MAKASSAR

OLEH:

OKTAFINA PIKOLI

B111 10 385

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

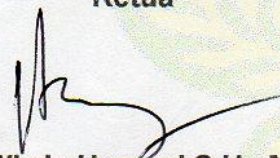
OKTAFINA PIKOLI

B11110385

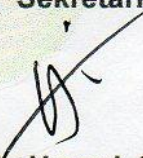
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 11 November 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Sekretaris


Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 004



**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : OKTAFINA PIKOLI

Nomor Pokok : B111 10 385

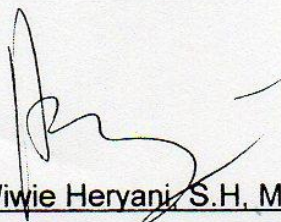
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, September 2014

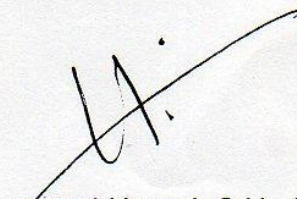
Pembimbing I,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

NIP. 196801251997022001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.

NIP. 198104182002121004

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : OKTAFINA PIKOLI
No. Pokok : B111 10 385
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2014

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I

D. Amadi Miru, S.H., M.H.
1951 607 1980 01 1 003

ABSTRAK

OKTAFINA PIKOLI, B111 10 385, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, dibawah bimbingan Ibu Wiwie Heryani selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Hasrul selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar kemudian di kompleks perumahan dan bukan kompleks perumahan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar belum efektif. Adapun hambatan yang timbul dalam pemungutan retribusi persampahan/kebersihan antara lain, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, Sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyak wajib retribusi yang tidak mampu membayar dan tidak mau membayar retribusi persampahan/kebersihan, serta masih banyak juga ditemukan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga masyarakat tidak mau membayar untuk kedua kalinya ke Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. mengatasi hambatan tersebut solusi yang telah dilakukan adalah memperbaiki peraturan daerah ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta **Manan Pikoli** dan **Syamsiah Abdullah** atas segala kasih sayang, cinta dan doa yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. Teruntuk saudara dan ponakan, **Sri Dewi Abdullah dan Arman Muhammad, Indrianti Pikoli, Yuslan Pikoli, Pranadia Muhammad, Raihan Muhammad** yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya,
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Staf dan jajarannya,
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H., selaku pembimbing II terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu bimbingan, dan saran kepada penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini,
5. Kepada tim penguji ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Bapak Ismail Arlip, S.H., M.Kn. yang senantiasa memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

6. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku penasehat akademik terima kasih atas nasihat dan bimbingannya,
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT. Membalasnya dengan limpahan pahala, amin,
8. Kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta Staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian,
9. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya.
10. Untuk semua keluarga tante Lisna Abdullah, Kartin Abdullah, Sartini Pikoli, Yahya Palowa, Ramang Abdullah, Yusnar Palowa yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Teman-teman seperjuangan LEGITIMASI 2010, Fitriah Faisal, S.H., Zigriya Anbiyana, Nur Annisa Rizky, Merry, Idawani, Dian, Fitriani Jamaluddin, S.H. , Mutiah Sari Mustakim, S.H. dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KKN Gelombang 85 Kecamatan Suli Barat, terutama posko Buntu Barana, Wahida Sakur, Satriyani, Anastiawan, Ardiansyah ML, Wira Adriani, Elvi Sahra, Fikry Azardy.
13. Teman-teman dan senior-senior serta adik-adik Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH-UH).

14. Teman-teman Ikatan Alumni Insan Cendekia Gorontalo Cabang Makassar (IAICG Makassar), Monica, Dimas, Fifi, Lian, Wati, Mira, Atun, Aco, Said, Dewi, Ayu Trifany, Kamel

15. Teman-teman Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Cabang Makassar (HPMIG Makassar), Tika Paudi, Rian Kumadji, Ruli, Nunu, Alan, Ain. Ka Nando, ka Dola, Ka Mat, ka Rio.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT. Senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhai segala aktivitas kita semua, amin.

Makassar, September 2014

Penulis,

Oktafina Pikoli

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Pengertian Dasar | 11 |
| 1. Retribusi | 11 |
| 2. Objek Retribusi Daerah..... | 14 |
| 3. Bukan Objek Retribusi Daerah..... | 15 |
| 4. Golongan Retribusi Daerah..... | 16 |
| 5. Fungsi Retribusi..... | 17 |
| 6. Sampah | 17 |
| 7. Objek Pelayanan Persampahan/Kebersihan..... | 19 |
| 8. Sumber Sampah..... | 20 |
| 9. Pelayanan | 21 |
| B. Penetapan Jenis Retribusi, Perhitungan dan Pemungutan Retribusi Daerah..... | 24 |
| 1. Penetapan Jenis Retribusi | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Perhitungan Retribusi Sampah | 24 |
| 3. Pemungutan Retribusi Daerah..... | 25 |
| C. Hukum Retribusi Daerah dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan... | 26 |
| D. Efektivitas Hukum | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| C. Populasi dan Sampel | 36 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 38 |
| E. Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar | 39 |
| B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar..... | 53 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Simpulan..... | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Struktur dan besar tarif retribusi persampahan/ kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan. Pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional, industry dan perdagangan | 42 |
| Tabel 2 : Daftar Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kota Makassar dari tahun 2008 sampai dengan 2012..... | 51 |
| Tabel 3 : Daftar Perbandingan Penanganan Sampah Kota Makassar Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun dari 2008 sampai dengan 2012 | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa, “pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Kemudian, dalam Ayat (5) dinyatakan bahwa, “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Pada saat ini, otonomi daerah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proposional

diwujudkan dalam bentuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan semangat tersebut, maka paradigma pemerintahan daerah yang dikembangkan harus bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan paradigma ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, transparan, dan *accountable*. (Adrian Sutedi, 2008 : 1)

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat.

Selain itu juga, Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia membawa perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan otonomi merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. (Adrian Sutedi, 2008 :185)

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah. Disamping itu, pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil meskipun beberapa jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Makassar untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut.

Berdasarkan letak wilayahnya, Makassar berpotensi sebagai kota bisnis dan perdagangan. Makassar juga merupakan salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur, sehingga banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di kota ini. Kota makassar semakin padat dan ramai sehingga kebutuhan masyarakat pun semakin banyak dan karena kegiatan manusia,

pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari, namun yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

Karena Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu, negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Sampah hingga kini masih menjadi masalah bagi sebagian besar kota di Indonesia. Tak terkecuali bagi kota Makassar. Dari data Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar jumlah timbulan sampah mencapai 3.812,69 M³ perhari dari tahun 2008 dan terus meningkat

hingga di tahun 2012 yaitu sekitar 4.057,28 M³ perhari, dan hampir di setiap ruas jalan tumpukan sampah masih ditemukan. Pemerintah kota Makassar harus lebih berusaha untuk mengatasi masalah sampah ini.

Status kota Makassar sebagai kota metropolitan yang tidak hanya di Kawasan Indonesia Bagian Timur saja, tetapi juga di Kawasan Indonesia keseluruhan mendorong terjadinya arus mobilisasi penduduk ke Kota Makassar. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kota Makassar bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan penduduk ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian sampah.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak lepas dari masalah sampah. Oleh karena itu, Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah, berupa retribusi dari setiap pelayanan sampah daerah tersebut. Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pengelolaan Persampahan/Kebersihan setiap daerah berbeda-beda. Untuk dapat diterapkan dalam suatu

daerah tertentu, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah tersebut.

Dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan pada Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal wewenang pengelolaan persampahan/kebersihan didelegasikan Walikota kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Makassar. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola persampahan di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Makassar. Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah kota Makassar terhadap pelayanan persampahan/kebersihan, maka peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti juga menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana efektivitas peraturan daerah tentang pelayanan persampahan/kebersihan diterapkan di tengah masyarakat.

Di Indonesia saat ini retribusi hanya di pungut oleh pemerintah daerah saja. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Dan dapat disimpulkan, bahwa retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka dirumuskan suatu masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.

Sementara itu, kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara akademis/teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan/kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu yang berbau sosiologi hukum, khususnya kajian hukum masyarakat dan pembangunan.

2. Secara praktis

Secara praktis dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, guna memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya di kota makassar tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar

1. Retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah Pasal 1 angka 64 menyatakan bahwa: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa :

Di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomis) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan/ mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib

membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang tidak dengan uang melainkan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu. Untuk memperoleh akte itu, yang bersangkutan harus/diwajibkan membeli materai. Misalnya juga pada retribusi pelayanan kesehatan, yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut. Hal ini berarti hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh orang yang menginginkan jasa tersebut. Jadi, setelah seseorang membayar retribusi maka seseorang ini berhak mendapatkan tegen prestasi secara langsung.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia (Marihot P. Siahaan, 2006: 7) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan,
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu, hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi.

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini (Marihot P. Siahaan, 2006: 434) :

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga peizinan tertentu masih dipungut retribusi.

3. Bukan Objek Retribusi Daerah

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila adalah jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan

tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

4. Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (2) retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini: (Marihot P. Siahaan, 2006: 435)

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa

umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

5. Fungsi Retribusi

Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. (Munawir, 1985: 16)

Dengan demikian, pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya, terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah di larang memungut retribusi pasar.

6. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah, “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”

Kemudian dalam Ayat (5) Pengelolaan sampah dimaksud adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan, yang salah satu contohnya adalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Menurut Apriadi (1989: 89) sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai:

Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian. (Apriadi, 1989: 89)

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah, “bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berkelebihan atau buangan.” (W.S. Purwodarminto, 1994: 152)

Dari pengertian di atas bahwa sampah dapat membahayakan lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan manusia nantinya, karena sampah mengandung zat-zat yang tidak digunakan oleh manusia, dan apabila menggunakannya harus diolah terlebih dahulu.

7. Objek Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

8. Sumber Sampah

Sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut: (Azwar Muchtar, 2012: 49).

a. Sampah dari pemukiman penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal pada suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik seperti sisa makanan yang bersifat basah, kering, abu, plastik dan lainnya.

b. Sampah dari tempat umum dan perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah

d. Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alam, perusahaan kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.

e. Sampah pertanian

Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binatang daerah pertanian misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

9. Pelayanan

Pengertian pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai kegiatan atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah, “membantu menyiapkan atau mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain.”

Menurut Moenir (1992: 16), untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa,

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan.

Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Sedangkan, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan adalah instansi pemerintah dimana penyelenggara pelayanan publik tersebut mempunyai tugas atau fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan jasa pelayanan.

Pelayanan publik juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Joko Widodo, 2001: 269)

publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Daryanto (1998: 363) pelayanan adalah cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan jasa. Pelayanan adalah memberikan layanan jasa atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

Libois Juan (Haryatmoko, 2011: 13) mendefinisikan pelayanan publik ialah:

semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling-tergantungan sosial, dan pada hakikatnya, pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan sosial, mengikis egoisme yang tidak rasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dalam rangka pencapaian tujuan kolektif.

Pengertian pelayanan publik perlu memperhitungkan unsur-unsur, (Haryatmoko, 2011: 14) sebagai berikut :

1. Pelayanan publik merupakan pengambil alihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan atau pelayanan dengan menghindari logika milik pribadi atau swasta karena tujuannya pertama-tama bukan mencari keuntungan.
2. Pelayanan publik mempunyai beragam bentuk organisasi hukum, baik di dalam maupun di luar sektor publik. Ada pula yang berbentuk perusahaan swasta, asosiasi-asosiasi yang berasal dari inisiatif pribadi atau swasta diakui memiliki fungsi pelayanan publik (organisasi keagamaan, asosiasi nirlaba).

3. Pelayanan publik, merupakan lembaga rakyat yang memberi pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan menerima tanggung jawab untuk memberi hasil. Berusaha memajukan kesejahteraan publik dan menumbuhkan kepercayaan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama merupakan bagian dari pelayanan publik.
4. Kekhasan pelayanan publik terletak dalam upaya merespons kebutuhan publik sebagai konsumen.

B. Penetapan Jenis Retribusi, Perhitungan, dan Pemungutan Retribusi Daerah

1. Penetapan Jenis Retribusi

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

2. Penghitungan Retribusi

Berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan

demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Cara perhitungan retribusi, besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

3. Pemungutan Retribusi Daerah

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 1 Ayat (72) dan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang disamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

C. Hukum Retribusi Daerah dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Setiap jenis retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi daerah dan pelayanan persampahan/kebersihan di Indonesia sebagaimana di bawah ini. (Marihot P. Siahaan, 2006: 41)

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di Undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
5. Keputusan Presiden, keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Retribusi.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
8. Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai aturan

pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada kabupaten/kota dimaksud.

D. Efektivitas Hukum

Dalam bahasan tentang efektivitas hukum, terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan, misalnya faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya hukum, benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu justru menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektif hukum.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat (Ahmad Ali, 1998: 191).

Menurut Krabbe (Ahmad Ali, 1998: 192), bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan:

kesadaran atau nilai-nilainya yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Pernyataan tersebut sudah

cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap lagi kalau jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C.Kelman (Achmad Ali, 1998: 193):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

Menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1998: 194) mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pengetahuan tentang isi hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

Agar suatu undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, Adam Podgorecki (Achmad Ali, 1998: 198), mengemukakan bahwa:

Di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering* diperlukan kemampuan-kemampuan sebagai berikut :

1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi;

2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan menyusun penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hierarkhis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya, apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk daripada penyakitnya;
3. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya, apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin tercapainya tujuan–tujuan yang dikehendaki atau tidak.
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang diberlakukan;
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralsir efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diberlakukan;
6. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.

Ketaatan hukum itu memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (Satmawati, 2007 :25) bahwa:

hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh hakim perilaku hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada fungsi. Rendahnya frekuensi perbuatan tadi yaitu bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan dan bahwa terjadinya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di dalam masyarakat.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia menurut Zainuddin Ali (2006: 94) berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi, filosofis.

Menurut Wayne Lafavre (Soerjono Soekanto, 2010: 7) bahwa :

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya dikresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain (Soerjono Soekanto, 2010: 8) sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan berpedoman pada persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka menurut J. Han Houtte (Soejono Soekanto, 2004: 24) dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum diharapkan berfungsi.

2. Pendapat-pendapat lain mengatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dan bidang penerangan dan pengkaidahan.

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat. Yang menuju pada pembentukan hukum (baik dalam keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama menyakut hukum fakultatif.

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dapat dijelaskan di atas dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya (Soerjono Soekanto, 2004: 26) adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Makassar. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab Makassar merupakan salah satu kota yang mempunyai masalah terhadap persampahan, bahkan sampah di Makassar dari tahun ke tahun terus meningkat sesuai dengan data dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Lebih khusus, penelitian ini dilakukan di lima kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kelima Kecamatan di Kota Makassar yang dimaksud antara lain terdiri sebagai berikut.

1. Kecamatan Biringkanaya
2. Kecamatan Tamalanrea
3. Kecamatan Panakuk kang
4. Kecamatan Rappocini
5. Kecamatan Mamajang

Selain dari kelima kecamatan di atas penulis juga melakukan penelitian di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Yaitu, pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pihak dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, masyarakat yang tinggal di Perumahan dan yang tinggal bukan di Perumahan.

b. Studi dokumentasi

Dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar yang tinggal di kompleks perumahan dan masyarakat yang tinggal bukan di kompleks perumahan.

b. Sampel

Adapun sampel yang diambil dari penelitian ini adalah :

3 orang dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

6 Masyarakat yang ada di Kecamatan Biringkanaya yang terdiri dari 3 masyarakat yang tinggal di Perumahan Bumi Permata Sudiang, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman kelurahan Sudiang.

6 masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalanrea yang terdiri dari 3 masyarakat yang tinggal di Perumahan Puri Asri, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman Tamalanrea Indah.

6 masyarakat yang tinggal di Kecamatan Panakukkang yang terdiri dari 3 masyarakat yang tinggal di Perumahan Lili, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman Tallo Baru.

6 masyarakat yang tinggal di Kecamatan Rappocini yang terdiri dari, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman Mapala, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman Tidung.

6 masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mamajang yang terdiri dari, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman Kelurahan Bonto Lembang, 3 masyarakat yang tinggal di Pemukiman Kelurahan Mandala.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dengan berpedoman pada literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.

E. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar

Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Makassar, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi

pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menggunakan karcis berwarna kuning atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan per bulan apabila terhadap pemukiman-pemukiman warga. Oleh

karena itu peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memungut retribusi dengan cara mendatangi wajib retribusi dengan memberikan kwitansi berwarna kuning sebagai bukti pembayaran yang sudah tercantum besarnya nilai uang yang harus dibayar.

Wajib retribusi yang dimaksud yaitu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagai berikut:

“Wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.”

Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan. Pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional, industri dan perdagangan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1

**Struktur dan Besar Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan
Meliputi Pengambilan, Pengangkutan, dan Pembuangan serta
Penyediaan Lokasi Pembuangan. Pemusnahan Sampah Rumah
Tangga, Bangunan Institusional, Industri dan Perdagangan**

| NO | JENIS BENTUK PELAYANAN | BESARNYA TARIF | KETERANGAN |
|----|---|----------------|---|
| 1 | peayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair dan industry lainnya (perseptik tank/tangki) | Rp. 250.000 | Pipa tidak lebih 25 m |
| 2 | sewa pipa penyedotan limbah tinja/industri | Rp. 5000 | per meter pipa |
| 3 | peayanan angkutan sampah rumah tangga (door to door) | Rp. 25.000 | per M ³ secara manual/bulan |
| 4 | peayanan angkutan sampah komersial | Rp. 30.000 | per M ³ secara manual/bulan |
| 5 | peayanan angkutan sampah luar biasa | Rp. 35.000 | per M ³ secara manual/alat berat |
| 6 | peayanan angkutan sampah kawasan perumahan elit dan jalan perkotaan | Rp. 50.000 | per M ³ secara manual/bulan |
| 7 | peayanan angkutan sampah rumah toko di luar kawasan perdagangan | Rp. 25.000 | per petak & satu lantai setiap bulan |
| 8 | peayanan angkutan sampah toko dalam kawasan perdagangan | Rp. 40.000 | per petak & satu lantai setiap bulan |
| 9 | peayanan angkutan sampah toko di luar kawasan perdagangan | Rp. 45.000 | per petak & satu lantai setiap bulan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | |
| 10 | pelayanan angkutan sampah rumah dan took dalam kawasan perdagangan | Rp. 60.000 | per petak & satu lantai setiap bulan |
| 11 | pelayanan angkutan kontainer diatas ukuran 2 s/d 6 M ³ | Rp. 150.000 | per (1) satu x angkut |
| 12 | tempat pembuangan langsung TPA tinja (IPLT/IPAL) | Rp. 25.000 | satu kali membuang |
| 13 | tempat pembuangan langsung TPA sampah tamangapa | Rp. 20.000 | satu kali membuang |
| 14 | pelayanan angkutan sampah rumah tangga (membuang langsung ke kontainer) | a. Rp. 30.000 b. Rp. 10.000 c. Rp. 8.500 | diatas ½ M ³ secara perbulan, ½ M ³ secara manual perbulan kurang ½ M ³ secara manual perbulan |
| 15 | pelayanan angkutan sampah penjual kaki lima | a. Rp. 3.000 b. Rp. 10.000 c. Rp. 8.500 | Perbulan per 2 minggu per minggu |

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar)

Pasal 9 ini merupakan dasar yang menjadi patokan oleh dinas ataupun masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi. Menurut Buyung selaku Staf di bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan (diwawancarai pada tanggal 13 Mei 2014) menyatakan bahwa, Dari Pasal 9 di atas terdapat kerancuan diantaranya yaitu, pada point 1 dan 2 disebutkan bahwa limbah cair termasuk dalam pengertian

sampah, artinya apa yang disebutkan antara pengertian sampah ini berbeda. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sehingga bukanlah menjadi suatu tugas dari dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar untuk melakukan penyedotan sampah cair tersebut. Selain itu juga ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa, sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kemudian menurut Buyung bahwa, Dalam hal pelayanan pemungutan sampah pada kontainer seperti pada point 15 mengenai pembayaran sampah pedagang kaki lima, selisih antara pembayaran yang dilakukan perbulan kemudian per dua minggu dan per minggu sangat kecil nilai yang harus dibayar. Pasti masyarakat akan membayar sampah senilai Rp.3000 per bulan dan ini sangat sedikit. Artinya pendapatan yang nantinya diperoleh dari retribusi sampah sangat sedikit jika petugas melakukan pemungutan perbulan.

Seharusnya perda ini perlu diperbaiki lebih baik lagi. Dan juga tidak dijelaskan dalam peraturan daerah ini mengenai pembayaran yang seperti apa yang dilakukan per bulan, per dua minggu ataupun perminggu.

Kemudian dalam hal pengukuran sampah, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar mengalami kesulitan dalam hal mengukur sampah-sampah karena tidak adanya alat ukur untuk mengukur sampah-sampah yang ada seperti layaknya pengukuran tarif air ataupun listrik, ini yang menjadi kendala dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk menetapkan berapa besar sampah yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai dengan jumlah timbulan sampahnya.

Adapun Perbandingan pelayanan retribusi dari setiap Perumahan dan Bukan perumahan di lima kecamatan di Kota Makassar yaitu :

1. Kecamatan Biringkanaya

Perumahan Bumi Permata Sudiang, di Perumahan ini pemungutan retribusi dilakukan perbulan oleh Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan cara mendatangi wajib retribusi dan memberikan kwitansi atau kupon berwarna kuning kepada wajib retribusi dengan biaya Rp.10.000 dan berlaku selama sebulan. Adapun pengangkutan sampah di perumahan ini dilakukan sekali

dalam seminggu. Bahkan biasanya petugas dinas sering terlambat mengangkut sampahnya, sehingga terjadi penumpukan sampah.

Pemukiman Kelurahan Sudiang, Tidak ada pemungutan retribusi di wilayah ini baik yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar maupun oleh pihak lurah, RT/RW setempat. Masih banyak penumpukan sampah yang terjadi di wilayah ini dan biasanya masyarakat membuang sampah di kontainer yang telah disediakan. Dari pihak Dinas mengangkutnya di kontainer itu seminggu sekali.

2. Kecamatan Tamalanrea

Perumahan Puri Asri, Pemungutan retribusinya dibayar di pos satpam setiap bulan dengan harga Rp.10.000 dan pengangkutannya dilakukan setiap senin dan kamis tetapi masih juga terdapat timbulan sampah di beberapa titik di wilayah ini. Biasanya juga petugas sering mengalami keterlambatan dalam mengangkut sampah.

Kelurahan Tamalanrea Indah, Pemungutannya dilakukan oleh RT/RW dengan mendatangi rumah-rumah yang besarnya retribusi dibayar adalah Rp.25.000 per bulan dengan biaya keamanan. Di tempat ini pengangkutannya dilakukan seminggu dua kali yaitu setiap senin dan kamis.

3. Kecamatan Panakuk kang

Perumahan Lili, Pemungutan retribusi di Perumahan Lili yaitu sebesar Rp.100.000 per bulan dilakukan oleh pihak RT/RW. Pembayaran retribusinya ini cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan perumahan lain seperti di Perumahan Puri Asri dan Perumahan Bumi Permata Sudiang yang masing-masing membayar Rp.10.000 per bulan. Tetapi pengangkutan sampah di perumahan ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan perumahan Bumi Permata Sudiang dan Perumahan Puri Asri, yang dilakukan setiap hari oleh pihak RT/RW, sehingga di Perumahan Lili ini tidak ada penumpukan sampah.

Kelurahan Tallo Baru, Tidak ada pemungutan Retribusi di wilayah ini, dan biasanya masyarakat membuang sampah di kontainer yang telah disediakan oleh pihak Dinas, dan pengangkutannya dilakukan sekali dalam seminggu. Jika petugas terlambat dalam mengangkut sampah maka sampahnya itu akan berserakan dan biasanya jatuh di sungai karena kontainer yang disediakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berdekatan dengan sungai.

4. Kecamatan Rappocini

Pemukiman Kelurahan Tidung, Tidak ada retribusi di pungut di wilayah ini oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tetapi biasanya ada tukang sampah yang dibayar untuk

mengangkut sampah tetapi bukan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Biasanya masyarakat membayar Rp. 5.000 setiap kali tukang sampahnya itu mengangkut sampah.

Pemukiman Kelurahan Mapala, Sama halnya dengan di pemukiman kelurahan Tidung. Di kelurahan ini tidak ada pemungutan sampah dilakukan oleh pihak Dinas tetapi oleh pihak Lurah, RT/RW. Dan pembayarannya langsung diberikan kepada petugas dengan harga Rp.5.000 tanpa menggunakan karcis/kupon.

5. Kecamatan Mamajang

Pemukiman Kelurahan Bonto Lebang, Tidak ada retribusi di wilayah ini baik oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar maupun pihak Lurah, RT/RW. Masyarakat di wilayah ini apabila membuang sampah biasanya di kontainer sampah yang dekat dan apabila jauh warga lebih memilih membakarnya jika timbulan sampahnya menumpuk.

Pemukiman Kelurahan Mandala, Tidak ada retribusi sampah di wilayah ini baik oleh Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan ataupun oleh Pihak RT/RW. Biasanya masyarakat melakukan pembuangan sampah di dekat sungai dikarenakan tidak ada tempat penyediaan kontainer sampah di wilayah ini. Sehingga banyak penumpukan sampah di wilayah ini terutama di bagian sungai banyak sekali ditemukan sampah-sampahnya. Apalagi sungai tersebut juga

berdekatan dengan pasar. Efek dari penumpukan sampah di wilayah ini menimbulkan bau busuk dan kurangnya nilai estetika.

Jika dibandingkan tingkat kebersihannya, maka retribusi yang di pungut oleh pihak Lurah, RT/RW lebih efektif dan bersih jika dibandingkan dengan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Oleh pihak RT/RW dilakukan setiap hari pengangkutan sampahnya. sedangkan oleh pihak Dinas sekali dalam seminggu dengan pemungutan retribusi yang murah tetapi tidak setiap hari diangkut sampahnya.

Pemungutan yang dilakukan oleh pihak Lurah, RT/RW ini sebenarnya belum diatur oleh Peraturan Daerah, oleh karena, itu pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar masih ingin melakukan perbaikan terhadap peraturan daerah ini. Jika pihak Lurah, RT/RW yang melakukan pemungutan retribusi harus ada keseimbangan pembagian retribusi. Contohnya, pihak Lurah, RT/RW apabila melakukan pemungutan retribusi diharapkan retribusinya itu dibagi dua antara pihak Kelurahan, RT/RW dan Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan, supaya antara pihak kelurahan, RT/RW dan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan mendapat keuntungan, tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Sehingga pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan merasa perlu adanya perbaikan terhadap peraturan daerah agar memasukan kebijakan oleh pihak

Lurah, RT/RW dalam sebuah peraturan daerah sehingga lebih jelas tugas dari masing-masing.

Memasukan kebijakan Lurah, RT/RW dalam sebuah peraturan Daerah agar pihak Lurah, RT/RW tidak melakukan pungutan liar (pungli). Selain itu, pihak dinas juga ingin memasukan kerjasama antara pihak Dinas dan Lurah, RT/RW dalam melakukan pemungutan retribusi agar sama-sama memiliki peran dan keuntungan masing-masing guna keefektifan dari pelayanan retribusi itu sendiri dan juga agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang maksimal.

Adapun mengenai keterlambatan dalam pengangkutan sampah, menurut Kussaiyeng selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menjelaskan bahwa, “keterlambatan pengangkutan sampah terkait masalah teknis mobil pengangkutan yang sering mengalami kerusakan, termasuk juga volume sampah sudah melebihi kondisi yang biasanya sekitar 600 ton sehari. Selain itu, keterlambatan juga terjadi jika pengawas kontainer di setiap kecamatan terlambat melaporkan. Sekedar diketahui bahwa petugas pengawas kontainer di setiap kecamatan bertugas untuk melaporkan kepada petugas pengangkut sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bahwa kontainer sudah full.

Sejauh ini pelaksanaan dari pemungutan retribusi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan, dimana retribusi

yang ditargetkan masih belum terealisasi sepenuhnya, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2
Daftar Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kota Makassar dari tahun 2008 sampai dengan 2012

| No. | Tahun | Yang ditargetkan | Yang terealisasi | % realisasi |
|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2008 | Rp. 1.952.172.000 | Rp.1.879.618.500 | 96,28% |
| 2 | 2009 | Rp. 1.952.172.000 | Rp.1.718.511.500 | 88,03% |
| 3 | 2010 | Rp. 5.449.655.000 | Rp.3.826.964.120 | 70,22% |
| 4 | 2011 | Rp. 5.596.163.000 | Rp.3.705.187.560 | 66,21% |
| 5 | 2012 | Rp. 5.596.163.000 | Rp.3.804.416.400 | 67,98% |

(sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)

Dari tabel di atas menyatakan bahwa penerimaan retribusi selama lima tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan, hal ini menurut Buyung, dikarenakan masih banyaknya warga yang tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi sampah ini, ada juga yang membayar tetapi membayar ke pihak lain selain pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Sehingga target yang telah ditetapkan dalam pemungutan retribusi masih belum terealisasi.

Sedangkan dalam hal penanganan sampah bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

**Daftar Perbandingan Penanganan Sampah Kota Makassar
Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun**

| No. | Tahun | Timbulan Sampah | Tertangani | % Terhadap Timbulan |
|------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2008 | 3.812,69 M3/Hari | 3.315,20 M3/Hari | 86,95% |
| 2 | 2009 | 3.680,03 M3/Hari | 3.278,12 M3/Hari | 89,08% |
| 3 | 2010 | 3.781,23 M3/Hari | 3.373,42 M3/Hari | 89,21% |
| 4 | 2011 | 3.923,52 M3/Hari | 3.520,07 M3/Hari | 89,72% |
| 5 | 2012 | 4.057,28 M3/Hari | 3.642,56 M3/Hari | 89,78% |

(sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa penanganan sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari presentase timbulan sampah pada bagan di atas. Artinya bahwa pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sudah mulai memperbaiki kinerjanya dalam melakukan penanganan terhadap sampah selama lima tahun guna menjadikan kota Makassar sebagai Kota *Green and Clean* seperti yang dicita-citakan.

Kerjasama Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan pihak swasta hanyalah dalam bentuk pengolahan sampah misalnya dengan PT. Gikoko kerjasama program CDM Flaring Gas kemudian dengan PT. Orgindo yaitu kerjasama program LRR Landfill Resouece Recovery (Produk Kompos Organik), kemudian kerjasama dengan PT. Unilever Indonesia, PT. Media Fajar dan Yayasan Peduli Negeri (YPN) melakukan program "*Makassar Green and Clean* (MGC)", yang tujuan utamanya mengajak masyarakat kota untuk

selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan di sekitar.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar

Efektivitas pelaksanaan dari suatu produk hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, faktor aparaturnya penegak hukum terkait yaitu, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, faktor prasarana yang berupa fasilitas guna menunjang Efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan faktor masyarakat yang berdomisili di kawasan perumahan maupun di kawasan bukan perumahan.

a. Faktor Substansi Peraturan Daerah

Substansi hukum dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi pelayanan persampahan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Efektivitas hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk

mengatur tingkat Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu pengaturan tentang retribusi dilaksanakan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat SKRD atau dengan dokumen sejenis yang dipersamakan.

Masih banyaknya kekurangan yang menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kota Makassar. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi ini menyebabkan banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan pemungutan retribusi. Sehingga banyaklah terjadi pungutan liar (pungli) terhadap retribusi sampah ini.

Menurut Buyung selaku pihak dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menyarankan agar pihak-pihak yang melakukan pungutan retribusi mungkin pihak RT/RW ataupun Lurah setempat harus ada keseimbangan dalam hal pembagian keuangan artinya bahwa hasil dari pembayaran retribusi yang diterima oleh pihak-pihak RT/RW atau Lurah dibagi bersama dengan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar sama-sama merasakan manfaatnya. Mengingat bahwa Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pun selalu melakukan pengangkutan sampah baik secara komunal maupun individual, jadi sampah yang diangkut oleh pihak

RT/RW ataupun Lurah itu diangkut pula oleh pihak Dinas Kebersihan pada Kontainer sedangkan pihak dinas tidak mendapatkan pembayaran dari retribusi sampah ini. Untuk itu agar lebih maksimalnya pelayanan retribusi sampah dari pihak dinas kebersihan kepada masyarakat perlu adanya keseimbangan dalam pembagian tugas.

Kemudian tidak adanya aturan yang jelas mengenai keterlambatan ataupun siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi. Sehingga membuat Perda ini sulit untuk diterapkan karena tidak ada pasal yang menjelaskan sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

b. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum dalam penelitian ini adalah Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap persampahan. yang salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap persampahan baik itu dalam memungut retribusi maupun memberikan pelayanan berupa mengangkut sampah baik secara komunal maupun individual. Sejauh ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memberikan pelayanan terhadap semua warga masyarakat baik yang tinggal di perumahan maupun yang tinggal bukan di perumahan. Tetapi kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sehingga pungutan-

pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat diawasi.

Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran seperti pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat tindakan yang tegas, misalnya melakukan pungutan retribusi sampah dengan tidak menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, mereka mengatakan bahwa pungutan liar terjadi di banyak tempat ketika pihak tertentu hendak melakukan pengangkutan sampah kemudian dari masyarakat langsung memberikan retribusi kepada pihak tersebut. hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan ini terjadi karena untuk mengawasi pelaksanaan pungutan tersebut dibutuhkan banyak tenaga pengawas, sedangkan tenaga pengawas yang dimiliki hanya terbatas dalam hal jumlah dan fasilitas.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa, jumlah petugas kebersihan yang ada hanya 560

orang, sedangkan kebutuhan idealnya yaitu 1000 orang untuk mengurus sampah di 143 kelurahan di Kota Makassar, serta anggaran kebersihan di Kota Makassar.

Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan itu sendiri mempunyai tujuan yaitu,

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;
2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh kepala daerah dan para penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari;
3. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan;
4. Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan atau keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah;
5. Untuk menyinergikan antara program atau kebijakan pemerintah daerah.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial, melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana sesuai dengan intruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki. Singkatnya dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelayanan Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memang belum maksimal karena adanya faktor kurangnya sarana dan prasarana. Sejauh ini jumlah armada pengangkut sampah masih terbatas jumlahnya belum lagi ditambah dengan banyaknya armada pengangkut sampah yang rusak karena kelebihan muatan kemudian jumlah dari petugas dinas kebersihan yang masih kurang. Karena terlalu banyaknya wilayah-wilayah di Makassar yang memerlukan pelayanan kebersihan sehingga fasilitas kurang memadai menyebabkan kurang efektifnya pelayanan persampahan di Kota ini.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bahwa :

Pihak Dinas memiliki 151 armada pengangkutan sampah 3 rusak total dan 40 sering mogok termakan usia. Dan akan ditambah 10 unit mengingat tingginya volume sampah di Kota Makassar. Sebagai pembanding, anggaran kebersihan di Kota Surabaya mencapai 200 Miliar per tahun sementara Makassar Cuma 20 Miliar Per Tahun. Itu sudah termasuk biaya operasional, gaji hingga pemeliharaan peralatan dan prasarana angkutan sampah.

d. Faktor Masyarakat

Dalam Masyarakat, yang mempengaruhi Efektivitas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat kota Makassar yang belum sadar akan penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh terhadap pelayanan baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang membayar retribusi sampah walaupun tanpa menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana disebutkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi sampah ini. Mereka hanya memikirkan asalkan sampahnya diangkut tanpa melihat apakah yang melakukan itu dari Dinas Pertamanan dan kebersihan ataupun tidak. Selain itu, menurut Bapak

Buyung masih banyak juga masyarakat yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi.

Kemudian menurut Kepala Bidang Bina Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Andi Murtan menjelaskan bahwa :

Pola pembuangan sampah oleh masyarakat saat ini belum tertib, sebagai contoh jika ditentukan penjemputan sampah jam 5 sore sampai jam 7 malam, itu sering tidak dipatuhi, kemudian kontainer sudah banyak lagi sampahnya, padahal sudah disampaikan. Jadi memang belum tertib.

Ketidapatuhan masyarakat terhadap jadwal-jadwal yang telah ditetapkan terhadap penjemputan sampah juga belum terlaksana karena masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui, dan tidak ada juga aturan yang jelas mengenai jadwal tersebut.

Sebenarnya penghasilan Kota Makassar dari retribusi sampah akan jauh lebih tinggi jika kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi itu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, tapi hal ini belum terlihat, terbukti dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu selain dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis menarik dapat kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar belum efektif. Karena masih terdapat kekurangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kemudian masih terdapat pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah ini.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 antara lain, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan dan masih ditemukan pihak yang memungut liar sehingga masyarakat tidak mau membayar untuk kedua kalinya kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

B. Saran

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah kota Makassar untuk mengkaji kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindaklanjuti.
2. Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu kepada siapa mereka membayar retribusi dan berapa yang seharusnya mereka bayar dan juga masyarakat lebih mengetahui aturan dan kewenangan dari masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Apriadi. 1989. *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*. Abdi Tandur, Jakarta.
- Azwar Muchtar. 2012. *Sumber Sampah*. PT Tiga Pertiwi, Yogyakarta.
- Daryanto. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Gramedia Pustaka Indah, Jakarta.
- Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko widodo. 2001. *Good Governance telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan control Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otoda*. Insan cedikia, Surabaya.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Alumni, Bandung.
- Marihot P. Siahaan. 2006. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan daerah di indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali pers, Jakarta.
- Purwodarminto, W. S. 1994. *Kamus Lingkungan*. Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kota Makassar.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN**

**Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Telp. (0411) 457001
MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 406 /DPK/V/2014

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ANDI ABDULLAH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **OKTAFINA PIKOLI**
NIM / Jurusan : B 111 10 385 / Ilmu Hukum
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **" EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN KOTA MAKASSAR "**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dari Tanggal 06 s/d 16 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2014



**An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS,**

Drs. ANDI ABDULLAH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19600818 198103 1 019

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
3. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu

Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

MAKASSAR 90222

Makassar, 05 Mei 2014

Kepada

Nomor : 6553/P2T-BKPM/19.36P/05/VII/2014

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Walikota Makassar

di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 3459/UN4.6.3/PL.02/2014 tanggal 28 April 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Oktafina Pikoli
Nomor Pokok : B 111 10 385
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 06 Mei s/d 06 Juni 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu



MUH. SAID WAHAB, SE.MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19660906 198609 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 315867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 06 Mei 2014

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PERTAMAMAN DAN
KEBERSIHAN KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070 / 1162 -III/BKBPV/2014
Sifat :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6553/P2T-BKPM/19.36P/04/VII/2014, Tanggal 05 Mei 2014, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : Oktafina Pikoli
NIM / Jurusan : B 111 10 385 / Ilmu Hukum
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar
Judul : "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **06 Mei s/d 06 Juni 2014**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

an. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Drs. H. FERDY AMIN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19660909 198603 1 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Asisten